



**STRATEGI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BATU**

**(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh

**NELLY NURUL IZZA**

**217.010.91.141**



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Nelly Nurul Izza, 2021, **Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**, Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Dosen Pembimbing I, Suyeno, S.Sos., M.AP Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mendeskripsikan Program Keluarga Harapan Kota Batu, (2). Memahami Kesejahteraan masyarakat Kota Batu setelah dilaksanakannya Program Keluarga Harapan, (3). Menganalisis Strategi Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan, (4). Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu

Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta – fakta serta hubungan variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data dan sampel sebagaimana adanya.

Dari hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya strategi Dinas Sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu memiliki nilai yang signifikan yakni dalam kategori baik yakni dengan skor 9986. Akan tetapi nilai signifikan sebesar 9986 tersebut juga masih memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Meskipun tanggapan responden secara umum meyakini bahwasannya pelaksanaannya menyatakan sudah cukup bagus namun masih terdapat beberapa masalah yang cukup krusial yakni terkait dengan lambatnya proses pencairan bantuan uang tunai, sosialisasi yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, pemberdayaan bantuan program kewirausahaan yang kurang dioptimalkan, serta masyarakat yang juga masih menggunakan bantuan uang tunai mereka untuk kebutuhan pokok mereka bukan untuk pembukaan lapangan usaha yang bisa mereka kelola secara mandiri.

**Kata Kunci: Strategi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan.**

## SUMMARY

*Nelly Nurul Izza, 2021, The Strategy of the Family of Hope Program in Improving the Welfare of the People of Batu City (A Study at the Batu City Social Service), Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si Supervisor I, Suyeno, S.Sos., M.AP Supervisor II.*

*This study aims to (1). Describing the Batu City Family Hope Program, (2). Understanding the Welfare of the people of Batu City after the implementation of the Family Hope Program, (3). Analyzing the Strategy of the Social Service in implementing the Family Hope Program, (4). To analyze how much influence the Harapan Family Program in Improving the Welfare of the People of Batu City*

*This research method uses descriptive qualitative research which is used to describe or analyze a research result but is not used to make broader conclusions. It can be concluded that the descriptive qualitative research method is a method that aims to systematically describe the facts and variable relationships that are investigated by collecting data and samples as they are.*

*From the results of research and analysis in this study, it can be concluded that the strategy of the Social Service towards improving the welfare of the people of Batu City has a significant value, namely in the good category with a score of 9986. However, the significant value of 9986 also still has many problems related to the implementation of the Family Hope Program, especially in the Junrejo District, Batu City. Although the responses of respondents generally state that the implementation is quite good, there are still some quite crucial problems, namely related to the slow process of disbursing cash assistance, socialization that is not understood by some people, empowerment of entrepreneurial assistance programs that are not optimized, and people who are also still use their cash assistance for their basic needs, not for opening a business field that they can manage independently.*

**Keywords:** *Strategy, Family Hope Program (PKH), Welfare*



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan di negara berkembang memang menjadi permasalahan yang genting untuk dapat ditanggulangi. Masalah kemiskinan menjadi faktor yang rumit dan penting untuk menjadikan sebuah negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan agar angka kemiskinan bisa ditekan dan terus dikurangi. Hal ini adalah permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia.

Dibanyak negara berkembang dunia termasuk Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan memang menjadi sebuah cita-cita yang sulit di wujudkan bagi setiap pemimpin negara. Upaya-upaya secara konteks di Indonesia ditujukan untuk mengurangi kemiskinan yang terus diluncurkan oleh pihak Pemerintah dengan berbagai model bantuan maupun program-program penanggulangan kemiskinan yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut mendapatkan hidup yang layak serta dapat mengembangkan dirinya dan melakukan fungsi sosialnya dengan baik. Hal ini terjadi apabila fungsi sosialnya berjalan dengan baik dan benar, maka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya.

Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan untuk mensejahterakan rakyat kemudian melahirkan Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, TNP2K merupakan lembaga dibawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara langsung.

Melihat kondisi masyarakat miskin itu maka, sangat diperlukannya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin kemudian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan Program Keluarga Harapan di tahun 2006 dan bekerjasama dengan Bank Dunia. Untuk pertama kalinya, pada bulan Agustus 2007 Pemerintah yang diwakili oleh Mentri Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone Balango Provinsi Gorontalo. Peluncuran tersebut menjadi langkah awal dalam peluncuran Program Keluarga Harapan secara Nasional, meskipun pada saat itu masih diluncurkan di 7 Provinsi yaitu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara dengan mengambil contoh disebanyak 48 Kabupaten/Kota dengan sasaran sebanyak 238.234 Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM).

Program Keluarga Harapan dikenal sebagai kebijakan solutif yang diberikan pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tujuan jangka panjang dari dikeluarkanya Program Keluarga Harapan adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari rantai kemiskinan, sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah meburangi beban Keluarga Sangat Miskin (KSM). Program keluarga harapan merupakan salah

satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), dengan kewajiban memeriksakan kesehatan rutin anak balita dan ibu hamil atau menyusui, serta menyekolahkan. Program ini secara umum adalah bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH, namun pada poin pentingnya program ini adalah bentuk program yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan hidup melalui beberapa bentuk program bagi masyarakat miskin yang sudah terdaftar secara sah sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Hasil akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup sosial Keluarga Sangat Miskin (KSM), yang dilakukan secara bersamaan dengan pelayanan pendidikan, dan kesehatan serta sebagai program bantuan lain seperti, Raskin, Jamkesmas, PSKS, dsb (Edi Suharto, Djuni Thamrin, 2012: 16)

Tujuan dikeluarkannya Program Keluarga Harapan ini berfokus untuk memutus rantai kemiskinan bagi generasi-generasi berikutnya dan juga memperbaiki taraf hidup masyarakat secara esensial menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Mangutip apa yang dikatakan Midgyle, bahwasannya *“kesejahteraan sosial merupakan a condition or state of human will being* “Masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan selain diberikan bantuan langsung bersyarat, para pendamping PKH juga memebrikan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan PKH agar terlepas dari rantai kemsikinan, sehingga PKH merupakan bantuan yang juga mendidik masyarakat agar tidak selalu mengahrapkan uluran tangan dari pemerintah.

**Tabel 1**  
**Angka Kemiskinan Kota Batu**

Tahun	Garis kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Presentase
2013	336 844	9,40	4,77
2014	353 317	9,10	4,59
2015	380 393	9,43	4,71
2016	398 401	9,05	4,48
2017	424 354	8,77	4,31
2018	467 073	7,98	3,89
2019	501 016	7,89	3,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu

Kota batu merupakan lokasi yang dijadikan obyek dalam penulisan ini. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin Kota Batu untuk ikut berperan dalam Program Keluarga Harapan yang nantinya akan memmberikan dampak logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan



masyarakat Kota Batu yang juga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dapat disadari bahwasanya Program Keluarga Harapan ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

**Tabel 2****Penerima Bantuan PKH Tahun 2018-2020**

Kecamatan	Tahun		
	2018	2019	2020
Batu	2.190	1619	1366
Junrejo	1.096	844	870
Bumiaji	2.363	1857	1662
<b>Total</b>	<b>5.649</b>	<b>4.320</b>	<b>3898</b>

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Batu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya kecamatan Junrejo masih mengalami peningkatan jumlah penerima bantuan PKH. Hal itu dikarenakan masyarakat di Kecamatan Junrejo sebagian besar sebagai buruh sebanyak 23.56 %. Sedangkan masyarakat yang belum bekerja sebanyak 19.74 %. Selanjutnya masyarakat yang mencukupi kebutuhannya berdasarkan hasil pertanian adalah sebanyak 19.29 %. Kemudian penduduk yang memilih pedangang sebagai mata pencahariannya sebagai pedagang adalah sebanyak 9.60 %. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Junrejo masih mengalami peningkatan

jumlah penerima PKH. Dinas Sosial Kota Batu menambah 100 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020. Dari data yang masuk ke Dinsos ada penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun ini. “Pendaftaran dilakukan secara teliti sesuai nama dan alamat agar kami bisa melihat ke lokasi tersebut apakah KPM benar-benar layak mendapatkan PKH atau tidak” jelas Ainur (SURYAMALANG.COM, Minggu 19/01/2020).

Inilah hal menarik yang kemudian melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil tentang bagaimana kemudian Program Keluarga Harapan ini dirasakan dan diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan selama ini. Dalam perjalanan Program Keluarga Harapan ini sebagai program sosial sejak tahun 2007 sampai pada saat ini, banyak dinamika permasalahan yang dialami baik kekurangan maupun kelebihan pada program ini. Banyak berbagai masalah terjadi di seluruh Indonesia yang masuk dalam wilayah cakupan Program Keluarga Harapan ini.

Program Keluarga Harapan di Kota Batu telah berjalan sejak tahun 2013 hingga sekarang. Antusias masyarakat ini sangat tinggi dilihat dari semangat masyarakatnya untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan pada setiap bulan oleh pihak pendamping PKH Kota Batu. Setiap peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak juga dijumpai mereka yang tidak bisa menulis dan membaca, akan tetapi semangat antusiasme dalam mengikuti pertemuan sangat tinggi. Meskipun banyak dari mereka tidak berpendidikan tinggi tetapi mereka tetap diberikan arahan untuk tidak

membiarkan anak-anak mereka terjerat dan jauh dari pendidikan., sehingga nantinya anak-anak mereka mempunyai kesempatan masa depan yang lebih baik.

Namun masih banyak juga orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya untuk bekerja saja di sawah membantu orang tua padahal seharusnya mereka belajar di sekolah. Oleh karena itu, PKH juga diharapkan mampu mengubah pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak sejak dini, sehingga mereka para orang tua mampu mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan yang lebih baik dan juga diharapkan orang tua mampu memanfaatkan bantuan PKH yang diberikan dengan bijak mungkin.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu: (1). Proses verifikasi yang sepenuhnya belum dilaksanakan, masyarakat memprotes data penerima tidak sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu pihak puskesmas dan sekolah merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara berkelanjutan. (2). Pembayaran kepada KSM tidak tepat waktu karena terkendala lambatnya proses verifikasi. Ketiga, kurangnya koordinasi yang baik dari instansi pendukung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan tidak semua KSM menerima jaminan kesehatan dan untuk orang miskin dan untuk bantuan pendidikan untuk siswa miskin. (3). Penerima bantuan PKH di Kota Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menurut koordinator PKH Kota Batu yang ia miliki berjumlah 2176 penerima. Seperti yang diketahui jumlah penerima semakin bertambah tetapi hasil masih menjadi tanda tanya. Semakin besar cakupan dan jumlah penerima maka semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Yang

masih menjadi pertanyaan bagi kita dalah mengapa PKH yang sudah dimulai sejak 7 tahun yang lalu di Kota Batu masih saja memiliki permasalahan disetiap tahunnya. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi dengan proses pelaksanaanya, dan bagaimana strategi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. oleh karena masalah-masalah tersebut kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu maslaah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melauli Program Keluarga Harpan di Kota Batu?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Program Keluarga Harapan Kota Batu.
2. Memahami Kesejahteraan masyarakat Kota Batu setelah dilaksanakanya Program Keluarga Harapan.
3. Menganalisis strategi Dinas Sosial Kota Batu dalam mengimplementasikan Prigram Keluarga Harapan (PKH).
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

#### **D. Manfaat penelitian**

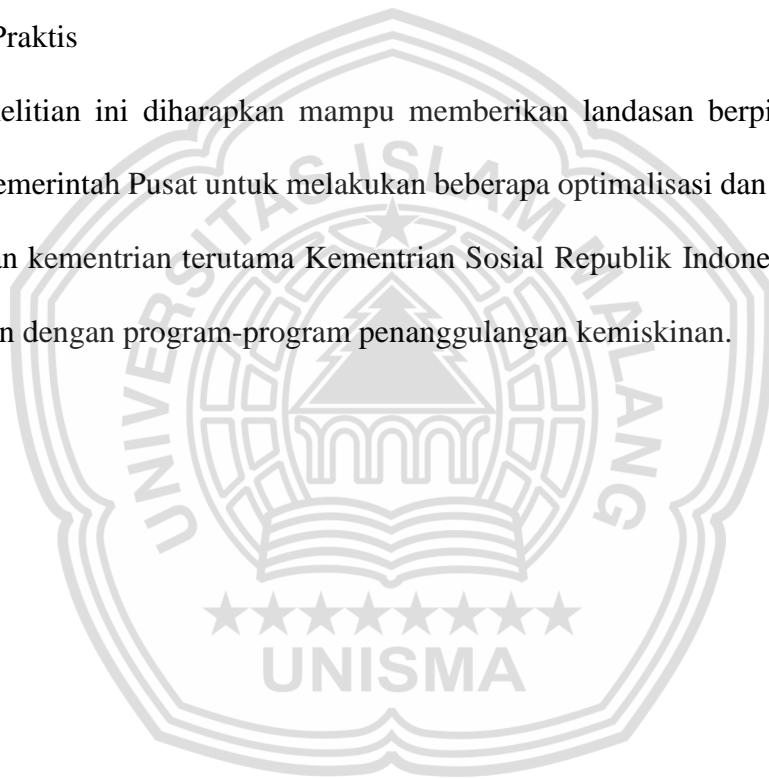
Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini termasuk dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut tentang ilmu politik, dan secara khusus menyangkut tentang kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berpikir bagi pihak Pemerintah Pusat untuk melakukan beberapa optimalisasi dan evaluasi di jajaran kementerian terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Rekapitulasi Data Telly Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Strategi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu Studi Pada Kec. Junrejo Kota Batu .....	xix
Lampiran 2: Data Penerima PKH .....	xxx
Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian .....	xxxii
Lampiran 4: Kuisisioner .....	xxxiii
Lampiran 5: Pedoman Wawancara .....	xxvi
Lampiran 6: Dokumentasi.....	xxvii

## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya strategi Dinas Sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu memiliki nilai yang signifikan yakni dalam kategori baik yakni dengan skor 9986. Akan tetapi nilai signifikan sebesar 9986 tersebut juga masih memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Meskipun tanggapan responden secara umum meyakini bahwasannya pelaksanaannya menyatakan sudah cukup bagus namun masih terdapat beberapa masalah yang cukup krusial yakni terkait dengan lambatnya proses pencairan bantuan uang tunai, sosialisasi yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, pemberdayaan bantuan program kewirausahaan yang kurang dioptimalkan, serta masyarakat yang juga masih menggunakan bantuan uang tunai mereka untuk kebutuhan pokok mereka bukan untuk pembukaan lapangan usaha yang bisa mereka kelola secara mandiri.

#### a) Indikator Sosialisasi

Pada indikator ini ada dua item yang dinilai yaitu komunikasi sosial dan kepehaman masyarakat. Nilai dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial Kota Batu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dari upaya indikator sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dibantu dengan pendamping PKH melakukan sosialisasi sebanyak sebulan sekali atau yang disebut dengan pertemuan rutin. Dengan bertempat di balai desa. Upaya yang dilakukan

oleh pihak Dinas Sosial Kota Batu adalah melakukan monitoring secara periodik dan memberikan pembinaan serta pengarahan kepada tiap KPM hingga menuai kepehaman masyarakat. Dapat disimpulkan pada indikator sosialisasi memperoleh skor 2458 dengan kategori cukup baik.

b) Indikator Tepat Pelaksanaan

Pada indikator Tepat Pelaksanaan ada dua item penilaian yaitu instrumen yang tepat dan koordinasi pendamping PKH. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Sosial dan pendamping PKH dinilai cukup baik dengan nilai skor 2508. Pihak Dinas Sosial dan Pendamping PKH juga telah melakukan koordinasi yang baik dengan para KPM yang nantinya akan memberikan pemahaman yang baik akan tetapi fungsi pengawasan serta evaluasi masih kurang optimal dilaksanakan, yaitu hanya mengandalkan dari hasil laporan bulanan para pendamping saja, sementara monitoring langsung ke lapangan masih jarang dilakukan. Padahal fungsi-fungsi itu semua merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam setiap proses manajemen.

c) Indikator Tepat Target

Dalam pelaksanaan Indikator tepat target terdapat dua item penilaian yaitu sesuai dengan kebijakan dan kesiapan penerima. Indikator tepat target memperoleh hasil cukup baik dengan nilai skor 2537 yang hampir mendekati kategori baik. Hal ini menandakan bahwasannya pihak Dinas Sosial dan pendamping PKH sesuai target dalam memberikan bantuan PKH tentunya dengan sesuai kebijakan pemerintah. Melalui wawancara dengan KPM, mereka juga merasakan dampak yang baik dikarenakan pendamping PKH dan Dinas Sosial telah memaksimalkan



tugasnya ketika memilih keluarga yang akan menerima manfaat PKH. Pada indikator tepat target pihak Dinas Sosial dibantu oleh kelurahan desa dan juga Kementerian Sosial dalam memilih penerima manfaat.

d) Indikator Tepat Lingkungan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada indikator Tepat Lingkungan yang mempunyai dua item penilaian yaitu dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan memperoleh skor 2483 dengan kategori cukup baik. Program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial dan Pendamping PKH harus memperhatikan persepsi masyarakat tentang Program Keluarga Harapan dengan cara menjangkau aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkauan aktif, Menjangkau aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkauan pasif, Menjangkau aspirasi masyarakat secara reaktif untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil masyarakat dan Merumuskan hasil penjangkauan masyarakat tersebut ke dalam sebuah dokumen aspirasi yang memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Dinas Sosial mengalami beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak

PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan.

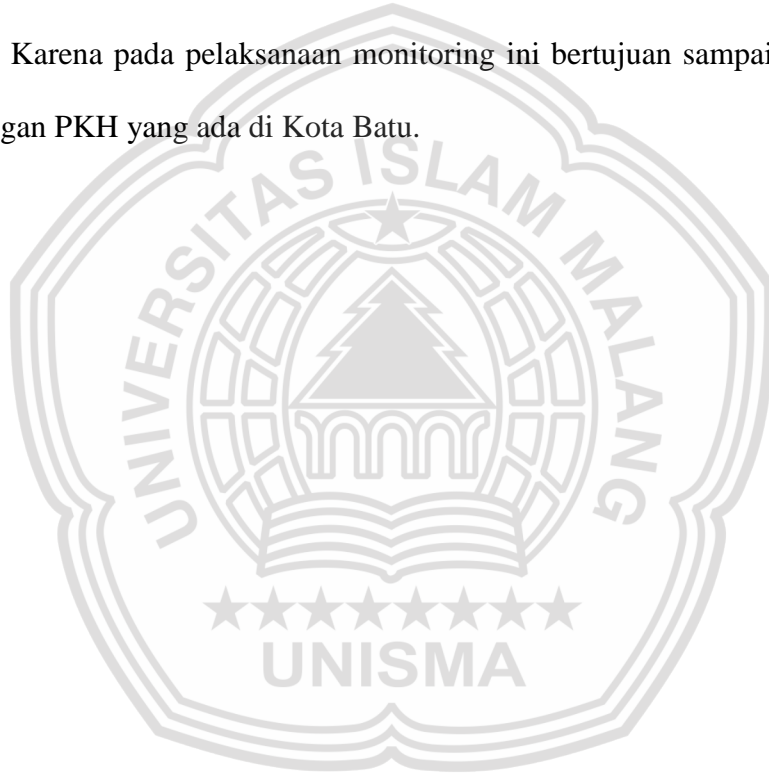
Adapun solusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan pendataan ulang kepada masyarakat miskin agar program bantuan ini kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat harus melakukan pendekatan dan pemahaman dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sehingga terwujudlah akan adanya Program Keluarga Harapan dan tim Program Keluarga Harapan juga harus terjun kelapangan dan memberikan arahan (sosialisasi) kepada masyarakat yang tidak paham akan adanya Program Keluarga Harapan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan analisis data, penulis berkenan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Batu:

- a. Perlunya dilakukan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia sendiri pada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pada peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, penarahan serta pelatihan kepada KPM, tentang penggunaan dana yang efektif. Hal itu bertujuan agar para KPM bisa membuka usaha sesuai dengan kemampuan mereka.

2. Perlunya peningkatan sosialisasi oleh Pendamping PKH dan Dinas Sosial. Setidaknya satu minggu sekali secara rutin. Hal ini bertujuan agar KPM lebih paham dalam mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin dan dapat lebih mengerti terhadap tugas dan kewajibannya. Agar dana yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah.
3. Peningkatan monitoring yang perlu juga ditingkatkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Batu. Karena pada pelaksanaan monitoring ini bertujuan sampai dimana perkembangan PKH yang ada di Kota Batu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Hutahulung, Simon. 2012. *Pemimpin, Birokrasi dan Kebijakan*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2002, hal 127.

Muhid, Abdul. 2012. *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows*. Surabaya: Zifatama Publishing.

Nugroho, Riant. (2011). *Public policy*. Jakarta: Elex media komputindo.

Santoso, D. (2018). *Penduduk Miskin Tasiend (Masalah Kemiskinan yang Terabaikan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (23 ed.). Bandung: CV. Alfabeta.

Sumadi, Dilla. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007, hal 144.

Umar, S., & Miftachul, C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Umar, Husein. 1996. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Sumber Jurnal

Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2014. *Laporan Akhir: Analisis Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Bappeda DIY.

BPPN.2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Dampak Terhadap Penyediaan Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kedepujian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah.

Delfira (2015). Presepsi Pegawai Pengambilan Keputusan Oleh Atasan Langsung Di Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X (Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau). *Jurnal: Administrasi Pendidikan*.

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kedepujian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. 2010. *Laporan Akhir: Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I*. Jakarta: Bappenas.

Kusuma Indrayani. 2014. Eektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Surabaya: *Jurnal Universitas Negri Surabaya (UNESA)*.

Masrizal. 2006. Mix Method Research. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Vol 6 No.2.

Prunaweni, Hartanti. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal :UNDIP*.

Rizal, Muhammad 2017. *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017*.

Sabarisman, M. (2015). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Keiskinan Di Kota Sukabumi. Sukabumi: Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Saraswati, Aprilia 2018. *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Islam (Studi kasus pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)* Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Slamet A Purwanto. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)* Malang : Jurnal Universitas Brawijaya Malang.

Suharto, Edi dan Thamrin, Djuni. 2012. *Program Keluarga Harapan:Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*. Jakarta:Aspirasi Vol.3 No. 1.

Sunarti, Euis.2006.*IndikatorKeluargaSejahtera:Sejarah Perkembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*.Bogor:Jurnal Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Supriyanto, A. S., & Maharani, V. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Widyastuti, Astriana 2010. *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*.

#### **Sumber Undang-Undang**

Impres No.3 Tahun 2011 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K.

Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Permensos No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1).

### Sumber Internet

Badan Pusat Statistik. (t.thn). Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin. Dipetik

Februari 03, 2020 ari <https://batukota.bps.go.id/>

Data Referensi Kementrian dan Pendidikan. Jenis Sarana Pendidikan di

Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2020. Dipetik Februari 03,2020

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Dinas Sosial Kota Batu. (t.thn). Profil Dinsos. Dipetik 2019, dari

<http://dinsos.batukota.go.id/profil/>

Program Keluarga Harapan. (t.thn). Dipetik April

7,2018<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=berita>

Wikipedia. (t.thn). Geografis Kota Batu. Diambil kembali dari

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Batu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu)

